

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

*DIREKTORAT ADVOKASI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN*



**TAHUN ANGGARAN
2024**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT ADVOKASI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

JAKARTA, FEBRUARI 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020-2024, khususnya untuk Penyelenggaraan Direktorat Advokasi yaitu Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Peningkatan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara berkelanjutan tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yaitu meningkatnya komitmen dari organisasi terkecil di masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui petugas pencegahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Dari sisi kinerja, secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2024, Direktorat Advokasi telah melaksanakan kegiatan dan mencapai seluruh target output Indeks ketahanan keluarga terhadap resiko penyalahgunaan narkoba dari target 78,700 dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,787. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja kegiatan ini adalah melalui Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan kemampuan pengasuhan orangtua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak serta kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba dimulai dari lini terkecil yaitu keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini, yang capaiannya memberikan dukungan dalam mewujudkan lingkungan yang Bersinar (Bersih Narkoba).

Dengan terbitnya laporan ini, berarti Direktur advokasi telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

LKIP Direktorat Advokasi 2024 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja, dimana TA 2023 ini berhasil dicapai kinerja naik sebesar **19,4%** yaitu menjadi **86,78%** dari target **78,70%** output indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Direktorat Advokasi 2024 ini dapat memicu dan memacu kinerja BNN khususnya Bidang Pencegahan, mencapai tingkat indeks ketahanan masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memberikan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Atas semua prestasi ini kami mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

Tim Penyusun LKIP

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	6
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT ADVOKASI	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, dalam setahun terakhir, masih cukup memprihatinkan. Fakta tersebut, menurut hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2021), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia naik sebesar 1,95% jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,80 % atau angka untuk setahun pakai sebesar $\pm 3.662.646$ orang, atau 195 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan. Dalam penelitian tersebut juga didapatkan data bahwa risiko perempuan dapat terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20% (2019) menjadi 1,21% (2021). Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari BNN semakin dibutuhkan dan diperlukan langkah yang lebih baik kedepannya untuk penanggulangan permasalahan tersebut.

Di Tahun 2018 Bidang Pencegahan BNN melakukan Pemetaan Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba dengan melibatkan 5.317 remaja yang tersebar di BNN Provinsi dan BNNKab/Kota yang mengeluarkan salah satu rekomendasi bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Merujuk hasil rekomendasi pemetaan tersebut, Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2024, Direktorat Advokasi bekerjasama dengan UNODC mengadaptasi model program penguatan institusi keluarga untuk menunjang pendidikan anti narkoba bagi keluarga. Program ini berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan parenting orangtua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak.

Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu pun Desa atau Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan narkoba. BNN menjadikan program ketahanan keluarga anti narkoba sebagai garda terdepan untuk mewujudkan

Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui penguatan sumber daya desa sehingga memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program yang berfokus pada Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba ini dilanjutkan berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dengan pengembangan pada wilayah Desa sebagai bentuk implementasi adanya Desa Bersinar dengan Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa. Kegiatan ini merupakan modifikasi antara program Desa Bersinar dan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Untuk itu, perlunya sinergitas dan dukungan serta komitmen dari Stakeholders (Instansi Pemerintah, Institusi Swasta, Lembaga Pendidikan, Ormas/ Pokmas) yang perannya strategis dan sangat penting dalam mewujudkan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Kebijakan yang di susun oleh Direktorat Advokasi dalam pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di seluruh instansi vertikal BNN, baik itu di BNN Provinsi maupun BNNKab/Kota dilakukan dengan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai panduan Direktorat Advokasi sebagai pembina fungsi serta menyusun petunjuk teknis kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai panduan pelaksanaan kegiatan oleh BNNP/BNNKab/Kota.

Adapun strategi untuk meningkatkan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan indeks kategori predikat "tinggi". Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang berada ditengah masyarakat sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan bekerjasama antar Kementerian/Lembaga/Daerah dan menjadikan mereka fasilitator melalui kerangka program ketahanan keluarga anti narkoba.

Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba ini sebagai upaya untuk mendorong dan memastikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah berkontribusi nyata melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang diorientasikan pada upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi pecandu narkoba maupun penegakkan hukum kejahatan narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di tahun 2024 dengan nilai Indeks yang berada pada kategori tinggi dengan target angka 85,39 (Kategori Tinggi). Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

ini di lakukan di 34 BNN Provinsi dan 173 BNN Kabupaten Kota dengan jumlah peserta yang mendapatkan intervensi sebanyak 2.070 keluarga.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Direktorat Advokasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Direktorat Advokasi memiliki tim di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Direktorat Advokasi adalah menyelenggarakan fungsi advokasi P4GN di bidang pencegahan.

3. Fungsi

Direktorat Advokasi memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diukur melalui indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Direktorat Advokasi dalam Struktur Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pencegahan BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Program P4GN pada Direktorat Advokasi memiliki rencana strategis untuk meningkatkan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan indeks kategori predikat "tinggi". Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang berada ditengah masyarakat sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan bekerjasama antar Kementerian/Lembaga/Daerah dan menjadikan mereka fasilitator melalui kerangka program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan salah satu bentuk penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan sarana bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota,

baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan partisipasi aktif dalam program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota. Karena keluarga lini terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh untuk memberikan daya tangkal serta mengubah pola pikir dan perilaku individu.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Direktorat Advokasi TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Deputi Bidang : Pencegahan

Direktorat : Advokasi

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78,70

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT ADVOKASI

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yaitu “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”. Untuk merealisasikan target tersebut, Direktorat Advokasi bekerja secara vertikal dengan satker BNNP dan BNNKab/Kota dan memiliki target indikator kegiatan yang sama yaitu Indeks Ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba. Adapun capaian kinerja Direktorat Advokasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78,70	86,78	110,28%

Capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari indeks 85.39 naik menjadi 86,79 sebagaimana gambar grafik berikut ini :

Grafik 1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024



Definisi operasional Indeks Ketahanan Keluarga adalah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Advokasi yang menunjukkan hasil atau gambaran sejauh mana daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian kinerja terhadap indeks ketahanan keluarga tersebut diperoleh dengan menggunakan dimensi Ketahanan keluarga yang menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi, dan Proses Komunikasi. Berdasarkan 3 dimensi diatas maka dilakukan pengukuran dengan metode teknik sampling terhadap 5 keluarga di masing-masing BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, dengan sasaran orangtua dan anak-anak yang memiliki kriteria usia 11 s.d 12 tahun atau berada pada jenjang SMP kelas 7 dari keluarga yang tidak bermasalah dengan narkoba, dengan mengisi kuesioner pada link survei. Gambaran dimensi pengukuran sebagaimana gambar berikut ini :



Gambar 1. Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024

Kinerja kegiatan Direktorat Advokasi berupa indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba dicapai melalui intervensi secara efektif, program intervensi yang dilakukan memberikan dampak terhadap penguatan keterampilan parenting, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi. Realisasi sebesar 86,78% dari target 78.70% mengindikasikan over prestasi dari target yang telah diperjanjikan dan capaian tersebut berada dalam

kategori “Tinggi” baik secara nasional maupun per wilayah. Hasil pengukuran indeks ketahanan keluarga secara rinci per dimensi sebagaimana tabel berikut ini :

Gambar 2. Hasil Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024



Dari tabel di atas, diperoleh hasil masing-masing dimensi masuk dalam kategori Tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut telah diterapkan dengan baik dalam keluarga yang berperan besar dalam meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk narkoba, sehingga anggota keluarga memiliki kesadaran, dukungan, dan kontrol diri yang lebih baik.

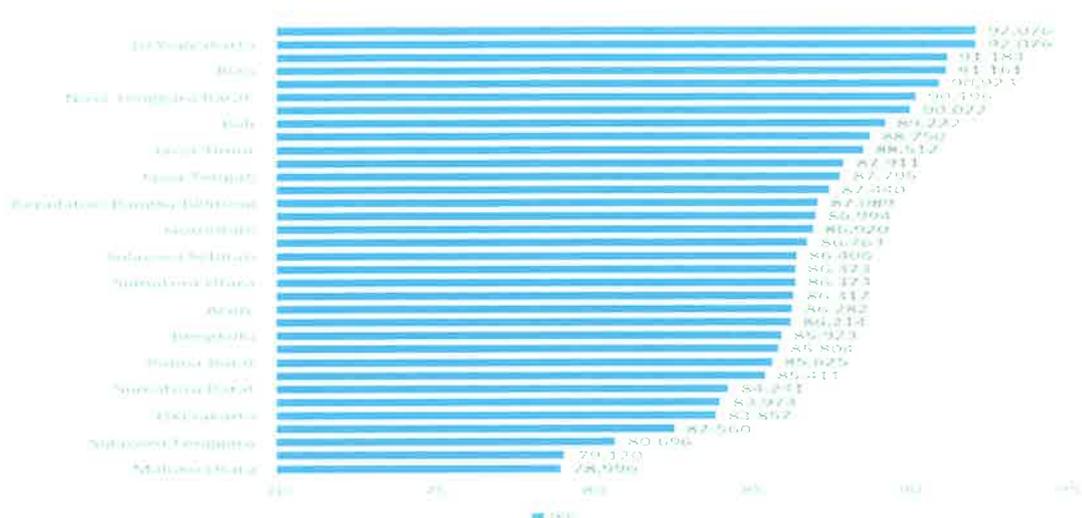
Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi membentuk lingkungan keluarga yang kuat, mendukung, dan memiliki prinsip yang jelas dalam menolak narkoba. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik, struktur keluarga yang terorganisir, serta menanamkan keyakinan yang kuat menjadi langkah strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Adapun penjelasan dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Sistem Keyakinan, terdiri dari :
 - a. **Nilai dan norma yang kuat:** Keluarga dengan sistem keyakinan yang kuat, baik berbasis agama, budaya, atau moral, cenderung memiliki daya tangkal lebih tinggi terhadap pengaruh buruk narkoba. Keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang lebih bijak.
 - b. **Internalisasi nilai anti-narkoba:** Jika keluarga menanamkan nilai-nilai anti-narkoba secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga akan lebih mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan luar.

- c. **Kepercayaan dan kepedulian antaranggota keluarga:** Keyakinan bahwa keluarga adalah tempat yang aman dan peduli terhadap kesejahteraan setiap anggotanya akan meningkatkan ketahanan terhadap godaan narkoba.
2. Dimensi Proses Organisasi, terdiri dari :
 - a. **Struktur keluarga yang kuat:** Keluarga dengan peran dan aturan yang jelas memiliki kontrol lebih baik terhadap perilaku anggota keluarga. Kehadiran figur orang tua yang tegas namun penuh kasih sayang membantu membentuk disiplin dan batasan yang sehat.
 - b. **Keterlibatan dalam kegiatan positif:** Organisasi dalam keluarga yang mendukung aktivitas positif, seperti olahraga, keagamaan, atau kegiatan sosial, dapat mengurangi risiko anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
 - c. **Pola asuh yang konsisten:** Keluarga dengan pola asuh yang konsisten dan berbasis nilai akan lebih efektif dalam memberikan pemahaman tentang konsekuensi negatif narkoba.
 3. Dimensi Proses Komunikasi, terdiri dari :
 - a. **Komunikasi dalam keluarga:** Keluarga dengan komunikasi yang terbuka dan efektif lebih mampu mendeteksi serta mencegah perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang merasa didengar dan dihargai oleh orang tua lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pelarian dalam narkoba.
 - b. **Pendidikan dan sosialisasi:** Informasi yang jelas dan berulang tentang bahaya narkoba akan meningkatkan kesadaran keluarga dalam mengenali tanda-tanda awal penggunaan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya.
 - c. **Dukungan emosional:** Komunikasi yang sehat menciptakan lingkungan yang suportif, sehingga anggota keluarga merasa lebih nyaman berbagi masalah mereka tanpa takut dihakimi:

Capaian kinerja indeks ketahanan keluarga per wilayah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Grafik 2. Capaian Indeks Ketahanan Keluarga 2024 Daerah



Hasil tersebut di atas tidak lepas dari kolaborasi dan sinergitas yang telah dilakukan selama ini oleh BNN dengan *stakeholder* terkait. Direktorat Advokasi juga telah melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Desa Bersinar) dengan berbagai K/L seperti BKKBN/Kemendukbangga, KemenPPPA, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan sebagainya. Sinergi dan kolaborasi tersebut untuk dapat mawadahi regulasi yang berkaitan dan memperkuat implementasi program Ketahanan Keluarga.

Terdapat korelasi yang kuat antara pencapaian kinerja dimensi organisasi terhadap meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta implementasi program ketahanan keluarga dan Desa Bersinar. Organisasi yang berkinerja baik dalam hal ini pemerintah daerah serta aparat desa/kelurahan setempat akan meningkatkan kesadaran dan daya tangkal keluarga terhadap narkoba. Ketahanan keluarga yang kuat mencegah anggota keluarga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Desa Bersinar berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung ketahanan keluarga dan mencegah penyebaran narkoba.

Capaian kinerja selama kurun waktu satu periode renstra dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3. Tabel Capaian Indeks Ketahanan Keluarga 2020-2024

Tingkat Keberhasilan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba selama 5 Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	78,67	78,68	78,69	78,70
Realisasi	N/A	81,43	84,28	85,39	86,78
Capaian	N/A	103,5	107,11	108,51	110,28

Dari tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 hasil kinerja tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan nomenklatur indikator kinerja.

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Advokasi, beberapa hal upaya strategis yang menjadi faktor keberhasilan antara lain adalah :

1. *Man* : dengan adanya sumber daya manusia yaitu Fasilitator Penyuluh BNNP/BNNK), *Stakeholder* terkait seperti BKKBN/Kemendukbangga, KemenPPPA, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan sebagainya.
2. *Material* : tersedianya alat serta data dukung seperti modul, juknis serta media dan perlengkapan pada saat kegiatan intervensi ketahanan keluarga berlangsung maupun evaluasi.
3. *Metode* : adanya peningkatan keterampilan untuk melatih fasilitator yang terlibat serta adanya monitoring melalui isian *google form*. Metode kolaborasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program.
4. *Money* : anggaran untuk pelaksanaan kegiatan baik DIPA maupun dukungan *stakeholder* terkait.
5. *Machine* : adanya aplikasi pengukuran kinerja

Dengan metode 5M tersebut tercapailah hasil evaluasi untuk mencapai kinerja Indeks Ketahanan Keluarga. Nilai Indeks yang dicapai oleh masing-masing satuan kerja menggambarkan latar belakang demografi yang berasal dari kondisi keluarga yang di berikan intervensi.

Dibalik keberhasilan terdapat beberapa kendala dalam menghadapi capaian kinerja. Permasalahannya antara lain adalah keterbatasa anggaran untuk mencapai target sasaran secara nasional. Terdapat 75.516.889 Keluarga di Indonesia (BKKBN 2023), sedangkan Direktorat Advokasi dan wilayah baru berhasil mengintervensi

5.190 Keluarga. Data BPS 2022 menunjukkan terdapat 83.794 Desa dan Kelurahan, sementara Direktorat Advokasi dan wilayah baru berhasil mengintervensi 1.905 Desa dan Kelurahan. Di butuhkan waktu ± 114 tahun untuk mengintervensi keluarga dan desa, oleh sebab itu dibutuhkan penguatan kolaborasi, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan serta pendekatan ikonik dan tematik.

Hambatan di atas berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai bahaya narkoba serta manfaat dari program ini. Di banyak daerah, narkoba mungkin masih dianggap sebagai masalah yang jauh atau tidak relevan, sehingga masyarakat tidak merasa perlu terlibat secara aktif.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Target Capaian Anggaran Direktorat Advokasi secara Nasional sebesar Rp 25.862.441.994 sebesar 98.10% selengkapnya digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 4.
Realisasi Capaian Kinerja Anggaran
Direktorat Advokasi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	26.362.461.000	25.862.441.994	98,10 %

Terdapat perbedaan target anggaran dengan perjanjian kinerja yang seharusnya sebesar 29.994.534.000 menjadi 26.362.461.000 hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun. Adapun analisis dari perubahan tersebut terdapat sisa anggaran Program sebesar Rp 500.019.006 atau sebesar 1,9% disebabkan adanya optimalisasi anggaran.

Sementara penggunaan anggaran sebesar 98,10% dianalisis sebagai upaya optimalisasi kegiatan yang telah ditargetkan pada tahun 2024

Tabel 5.

Realisasi Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAAN
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika	78.69	86,78	110.28%	<p>Bentuk Program : Intervensi ketahanan keluarga anti narkotika</p> <p>Meliputi : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</p>	26.362.461.000	25.862.441.994	98.10%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Direktorat Advokasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputan Bidang Pencegahan. Direktorat Advokasi memiliki dua unit koordinator dan empat unit subkoordinator. Di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M dan bagian Pencegahan.

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Advokasi Tahun Anggaran 2024 berjalan pada arah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja Direktorat Advokasi antara lain:

- a. Sinergi lintas sektor dari Kementerian dan Lembaga serta para stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya melalui dukungan program intervensi berbasis lingkungan keluarga.
- b. Terbangunnya kesadaran di desa/kelurahan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana desa.
- c. Peran aktif para penyuluh dalam memberikan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan resikonya.
- d. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait Indikator Kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing
- e. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja
- f. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah
- g. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertical
- h. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.

- i. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk apa yang kami sebut sebagai sebuah kinerja dan menjadikan kinerja sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- j. Secara umum, keberhasilan pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba sangat dipengaruhi oleh materi intervensi ketahanan keluarga yang di sampaikan serta para pendukung program (panitia, narasumber, fasilitator, keluarga maupun pihak desa/kelurahan) yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga sehingga didapatkan nilai ketahanan keluarga anti narkoba.

B. SARAN

Menyadari sepenuhnya masih banyak hal yang perlu kita lakukan supaya lebih optimal dalam pelaksanaan kerja yang berkinerja, maka kedepan perlu untuk lebih meningkatkan supervisi, pendampingan satker vertikal dalam pelaksanaan program terutama Advokasi. Selain itu perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara realtime sejak dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat lebih terpantau permasalahan yang muncul dilapangan untuk kemudian dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang pada akhirnya akan memperlancar pekerjaan dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

Jakarta, Februari 2025

Direktur Advokasi



Drs. Jafriedi ,M.M.